

# PERMASALAHAN INTERNAL DAN EKSTERNAL RUMAH TANGGA MISKIN DALAM MENUNTASKAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PASAMAN

**Yulia Anas, Fery Andrianus dan Syon Syarid**

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas  
Jl. Universitas Andalas, Limau Manis Pauh Padang  
yulia.anas@yahoo.co.id

**Abstract :** *This Research aims to know the problems of poor household in completing basic education either internally or externally in Pasaman. By using qualitative research methods for 100 sample can conclude that the main problems of the household in completing basic education internally is as follows: 1) 53% because of the difficulty of financing schools. 2.) 40% due to the lack of motivation of the school be it from children or household, 3). 32% because the mind is not capable, 4). 17% because the value is less or ugly, 5). 13% due to help take care of the household, 6). 11% for household felt education was enough/is already better than the education of head of household, 7&8) 3% due to work as family workers and 1% as labour, 8) 2% due to illness/disability so that it could not complete their primary education. While externally is because; 1) 36% due to the influence of the environment, of which around household settlement generally has many children dropped out of school, 2) 11% because of long distances to school cause homes not being able to complete their primary education because of long distances is accompanied by large transport fare.*

**Keywords:** *alleviation of primary education, the region is at risk of failure of Wajar 9 years, poor households*

**Abstrak :** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh rumahtangga miskin dalam menuntaskan pendidikan dasar baik secara internal dan eskternal di Kabupaten Pasaman. Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif terhadap 100 sampel rumahtangga diperoleh bahwa permasalahan utama rumahtangga dalam menuntaskan pendidikan dasar secara internal adalah sebagai berikut ;1) 53% karena kesulitan membiayai sekolah. 2). 40% karena tidak adanya motivasi sekolah baik itu dari anak maupun rumahtangga, 3).32% karena pikiran tidak mampu,4).17% karena nilai kurang atau Jelek,5).13% karena membantu mengurus rumahtangga, 6).11% karena rumahtangga merasa pendidikan anak sudah cukup/ sudah lebih baik dari pendidikan kepala rumahtangga, 7&8) 3% karena bekerja sebagai pekerja keluarga dan 1% sebagai buruh, 9)2% karena sakit/cacat sehingga tidak bisa menuntaskan pendidikan dasar. Sedangkan secara eksternal adalah karena; 1)36% karena pengaruh lingkungan, dimana di sekitar pemukiman rumahtangga umumnya banyak terdapat anak putus sekolah, 2) 11% karena jarak yang jauh ke sekolah menyebabkan rumahtangga tidak mampu untuk menuntaskan pendidikan dasar karena jarak yang jauh diiringi pula oleh ongkos transport yang besar.*

**Keywords :** *Penuntasan pendidikan dasar, daerah beresiko kegagalan Wajar 9Tahun, Rumah Tangga Miskin*

Salah satu agenda yang ditargetkan dalam MDGs yang sudah disepakati oleh dunia internasional pada tahun 2015 adalah tercapainya pemerataan pendidikan untuk kelompok anak usia 7-15 tahun dan menyisakan jumlah penduduk dewasa yang buta huruf, dalam terminologynya sering dinyatakan sebagai tingkat 'kebodohan', menjadi tersisa separo dari jumlah tahun dasar (BPS, 2014). Agenda MDGs tersebut juga telah dijadikan sebagai salah satu agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sektor Pendidikan Nasional dan tercantum di dalam RPJM Propinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Pasaman termasuk salah satu daerah yang masih memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) yang jauh dari pencapaian target MDG di Provinsi Sumatera Barat. Walaupun Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD sudah mencapai 97,37% namun jika dilihat pada usia pendidikan yang lebih tinggi, tingkat SMP sebesar 66,29% dan tingkat SMA hanya sebesar 48,21%, berarti lebih dari separuh penduduk usia 16 – 18 tahun di Kabupaten Pasaman tidak lagi melanjutkan sekolah (BPS Sumbar, 2013). Tingginya angka putus sekolah lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang beresiko kegagalan wajar 9 tahun, yaitu daerah perkebunan dan daerah pinggiran hutan. Padahal untuk memasuki MDGs 2015 Pemerintah Daerah harus menuntaskan Wajar 9 Tahun dan bersiap memasuki Wajib Belajar 12 tahun. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan kegagalan dalam pencapaian pemerataan pendidikan dasar dalam menghadapi MDGs pada tahun 2015.

Dalam kajian yang sudah pernah dilakukan pada tahun 2009 di Kabupaten Pasaman (Yulia&Elfindri,2009) ditemukan bahwa pemetaan masalah anak putus sekolah pada daerah-daerah yang rawan kegagalan wajib belajar 9 tahun di kabupaten Pasaman beragam sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing. Kondisi tersebut dikhawatirkan dalam jangka panjang akan menyumbang kegagalan dalam pencapaian pemerataan pendidikan untuk menghadapi MDGs 2015. Karena kondisi ini akan berpengaruh terhadap kesediaan rumah tangga dalam menuntaskan pendidikan dasar anak mereka, sedangkan selama ini upaya untuk mengatasi persoalan perluasan akses pendidikan dasar hanya dilakukan secara general saja, seperti dengan program BOS, BOS Buku dan sekolah 1 atap.

Sekolah satu atap yaitu pendirian sekolah yang berlokasi pada daerah terpencil dilengkapi dengan fasilitas pendidikan ditempatkan satu atap dengan penyelenggaraan pendidikan SD. Guru-guru direkrut dari guru Sekolah Dasar setempat. Upaya untuk menerapkan program ini sangat intensif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan diperkirakan menjangkau kebanyakan daerah terpencil. Padahal besar dugaan angka melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SMP pada daerah-daerah yang dimaksudkan di atas masih menuai persoalan. Karena persoalan anak putus sekolah berbeda-beda berdasarkan karakteristik daerahnya. Diantara persoalan utama tersebut diduga berasal dari faktor internal rumah tangga miskin berupa kesediaan rumah tangga terutama rumah tangga yang miskin dalam melanjutkan pendidikan dasar anaknya.

Persoalan pendidikan dasar perlu dikaji ke akar-akarnya Tanpa diketahui akar persoalan, dan bentuk penanggulangannya, maka dikhawatirkan dalam jangka panjang Kabupaten Pasaman yang termasuk daerah termiskin di Propinsi

Sumatera Barat, merupakan bagian dari kegagalan Sumatera Barat dalam mencapai MDGs tersebut. Kabupaten Pasaman memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Sumatera Barat, sekitar 10,42 % (BPS, 2011).

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan kajian tentang bagaimana permasalahan yang dihadapi rumahtangga miskin di daerah beresiko kegagalan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Pasaman dengan menekankan analisa pada permasalahan utama yang dihadapi oleh rumah tangga miskin dalam mengeluarkan biaya pendidikan, baik itu secara internal maupun eksternal, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan strategi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Sejak awal 1970-an pendidikan memang sudah mejadi prioritas kebijakan pemerintah Indonesia. Pada tahun 1973 berdasarkan Inpres Nomor 10 pemerintah secara terencana meningkatkan pembangunan sarana pendidikan dasar. Tahun 1983 dimulai program Wajib belajar 6 tahun untuk anak usia 7 – 12 tahun secara nasional. Sukses yang dicapai dengan program Wajib belajar 6 tahun ini memotivasi pemerintah untuk meningkatkan program wajib belajar menjadi 9 tahun sejak bulan Mei tahun 1994 yang lalu. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijaksanaan pendidikan dasar 9 tahun sampai dengan tingkat SLTP/satuan pendidikan sederajat adalah wajib belajar bagi semua warga negara Wajib Belajar 9 Tahun merupakan salah satu program akhir-akhir ini gencar di dengungkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Program ini mewajibkan setiap warga negara untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non-formal, sehingga seluruh anak usia 7–15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dititikberatkan pada: (1) peningkatan partisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar, terutama melalui penjarangan anak-anak yang belum pernah sekolah pada jenjang SD/MI dan peningkatan angka melanjutkan lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs/sederajat, (2) mempertahankan kinerja pendidikan yang telah dicapai terutama menurunkan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta dengan meningkatkan kualitas pendidikan; dan (3) penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Pada awalnya, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) akan menuntaskan program wajib belajar (wajib) 9 tahun pada pendidikan dasar (SD dan SMP) paling lambat tahun 2008. Namun ternyata Program Wajib Belajar 9 Tahun yang ditargetkan Departemen Pendidikan Nasional akan diraih tahun 2008 terancam gagal. Itu semua terjadi karena masih banyaknya kendala yang dihadapi

dalam penyelenggaraannya, khususnya berkait dengan akses pendidikan dan mutua pendidikan, yang masih relatif rendah, yang mencakup tenaga kependidikan, fasilitas, pembiayaan, manajemen, proses dan prestasi siswa masih rendah. Program Wajib belajar 9 tahun didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (*universal basic education*), yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Hal ini sesuai dengan kaedah-kaedah yang tercantum dalam Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak.

Dalam penelitian tentang model penuntasan wajib belajar pada rumah tangga miskin digunakan kerangka berfikir ekonomi pendidikan yang dikembangkan oleh Lebowitz (1996), dan dijadikan oleh Bank Dunia sebagai dasar penelitian untuk pencapaian basic education study (World Bank, 1989), kemudian dilanjutkan oleh Elfindri untuk Sumatera Barat (1998) dan penelitian Yulia (2010). Inti yang dibicarakan adalah faktor apakah yang mendorong agar pelayanan pendidikan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Lebowitz (1996) memuat review penelitian yang mengkaji kenapa terjadinya permintaan terhadap pelayanan pendidikan. Faktor utama berasal dari ketersediaan pelayanan, jarak, kondisi rumah tangga, serta kondisi anak, termasuk budaya. Dalam teori yang dijelaskan adalah jarak tempuh dapat semakin mengurangi probabilitas anak untuk mengecap pendidikan. Teori Lebowitz sendiri masih mengalami keterbatasan dalam hal penterjemahan jarak tempuh, yang mana di negara berkembang keterisolasian saja belum tentu menjelaskan persoalan.

Kajian yang terkait dengan hal ini masih terbatas, walaupun masing-masing disiplin ilmu mengemukakan penekanan berbeda satu dengan yang lain. Yulia (2010) yang mengkaji pemetaan masalah pendidikan di Kabupaten Pasaman menemukan bahwa faktor pelayanan permintaan untuk pendidikan dasar dipengaruhi oleh faktor pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan (biaya sekolah). Riset Elfindri (1998) juga menemukan dengan menggunakan data Susenas 1996 bahwa diantara faktor terpenting menjelaskan permintaan pendidikan adalah daya beli masyarakat untuk membayar pendidikan, pendidikan kepala rumah tangga, serta jarak tempuh. Angka putus sekolah tertinggi bilamana pada daerah yang bersangkutan tidak memiliki fasilitas penerangan, dan jarak tempuh ke sekolah di atas 2 kilometer. Penelitian lanjutan terhadap persoalan pemerataan pendidikan tidak saja disebabkan karena beban SPP saja (Elfindri 2006a, 2006b), namun disebabkan karena persoalan beban ekonomis sekolah. Dimana beban ekonomis sekolah selain dari beban SPP, biaya buku, opportunity costs, dan lainnya.

Berbeda dengan pendekatan di atas yang lebih memfokuskan pada penelitian rumah tangga, Narayan (1995) mengusulkan penekanan kajian kepada aspek komunitas, dimana peranan komunitas menjadi lebih dominan dalam menjelaskan ketercapaian pemerataan pendidikan dibandingkan dengan masing-masing rumah tangga. Narayan mencoba sampai kepada keyakinan bahwa selain inisiatif komunitas desentralisasi penyelenggaraan pendidikan juga dapat mendorong pencapaian dari pemerataan pendidikan. Pendekatan Narayan telah diaplikasikan dan dinilai oleh Fiske (1996), dan menunjukkan keberhasilan

penerapan pencapaian pemerataan pendidikan di Brazil. Dari hasil penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengatasi persoalan penuntasan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Pasaman. Studi ini merupakan lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2010) yang telah melakukan kajian terhadap permasalahan pendidikan dasar di Kabupaten Pasaman lima tahun yang lalu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kebijakan dengan memanfaatkan berbagai sumber sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif maka diperlukan upaya untuk mengenal dan mengolah data sekunder dan data primer. Data sekunder utama adalah data tentang profil pendidikan di Kabupaten Pasaman dan sumber data lainnya. Oleh karena data sekunder belum mengakomodasi kebutuhan data, maka dilakukan penelitian lapangan, *fieldwork survey*, dengan mengacu kepada pemahaman kedalaman terhadap masalah, dan upaya untuk menemukan akar masalah. Kemudian dari informasi kedalaman masalah dapat dilanjutkan dengan mendesain bagaimana mengatasi persoalan yang sedang dipelajari. Kombinasi dari penelitian rumah tangga pendekatan Lebowitz (1996) dengan pendekatan komunitas oleh Narayan (1996) berguna untuk mengetahui strategy dan kebijakan dalam menuntaskan pendidikan dasar dalam menghadapi MDGs.

Subjek penelitian pada tahap ini ada dua. *Pertama* adalah rumah tangga yang memiliki anak usia 12-15 yang putus sekolah, yang tinggal di daerah yang beresiko terjadinya kegagalan pencapaian MDGs di Kabupaten Pasaman. Pengelompokan usia 12-15 tahun dipilih untuk mengetahui banyaknya jumlah anak yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan dari Sekolah Dasar ke SMP atau tidak menyelesaikan pendidikan SMP (pendidikan dasar). Jumlah populasi disesuaikan dengan jumlah populasi daerah terpilih dan sample ditentukan maksimal 50% dari populasi di daerah terpilih. Dan diperkirakan jumlah sample keseluruhan adalah 100 RT. *Kedua* adalah dukungan informasi lanjutan yang berasal dari pemangku pendidikan. Diantaranya adalah masyarakat, guru, kepala sekolah, dan tokoh masyarakat serta Dinas Pendidikan. Hal ini perlu untuk melengkapi informasi pada subjek penelitian pertama.

Penelitian ini dilakukan di daerah yang sulit dari segi ketercapaian pemerataan pendidikan di kabupaten Pasaman, daerah perkebunan dan daerah pinggiran hutan. Daerah yang mewakili daerah Pinggiran Hutan adalah Kecamatan Duo Koto, karena memiliki hutan negara terluas yaitu 23.170 ha atau 43,35 % dari hutan negara yang ada di Kabupaten pasaman (BPS, 2014). Sedangkan yang mewakili daerah perkebunan adalah Kecamatan Mapat Tunggul, karena merupakan daerah Perkebunan karet yang memiliki luas dan produksi kebun tanaman Karet terbesar di Kabupaten Pasaman dengan luas mencapai 4.835 ha dan produksi sebesar 2.917 ton (BPS, Kab. Pasaman, 2014) .

**Tabel 1 Daerah penelitian di Kabupaten Pasaman**

<b>Daerah a/</b>	<b>Lokasi b/</b>	<b>Perkiraan RT c/</b>
Perkebunan	2- 4 Desa di 1 Kec. Mapat Tunggul	50 Rt (Sistematik)
Pinggiran hutan	2- 4 Desa di 1 Kec. Duo Koto	50 Rt (Sistematik)
Total	6 - 8 Desa	100 Rt (sistematik)

a/ Sesuai dengan karakteristik tempat

b/ Desa yang paling terpencil dari akses transportasi

c/ Jumlah rumah tangga disesuaikan dengan populasi yang ada.

Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan cara survey dan wawancara terhadap rumah tangga sampel dengan alat media berupa kuesioner. Wawancara dilakukan dengan terstruktur dan menggunakan alat perekam..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Rumah Tangga Miskin**

#### **Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga**

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rumahtangga lebih banyak di kepalai oleh laki-laki sebanyak 86 % dan perempuan sebanyak 14 %. Kepala rumah tangga perempuan berperan sebagai ibu dan sekaligus sebagai kepala rumah tangga bagi anak-anaknya dengan rata-rata setiap rumah tangga menghidupi anggota keluarga sebanyak 7 orang.

**Tabel . 2. Kepala Rumah Tangga berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persen</b>
Laki-laki	86	86
Perempuan	14	14
Total	100	100,0

Sumber : Data Penelitian di Kabupaten Pasaman (Primer). 2015.

#### **Jumlah Anggota Rumah Tangga**

Setiap rumah tangga menanggung lebih dari 4 orang anggota rumahtangga. Sekitar 30% memiliki anggota rumahtangga sebanyak 5 orang, 28% sebanyak 7 orang, bahkan 24 % rumahtangga memiliki jumlah anggota rumahtangga sebanyak 11 orang. Hanya 1% yang memiliki anggota rumahtangga sebanyak 4 orang. Namun secara rata-rata setiap rumahtangga memiliki 7 orang anak.

#### **Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga**

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga termasuk rendah, dimana 76 % pendidikan kepala rumah tangga adalah tamatan Sekolah Dasar dan sekitar 18 % tidak pernah sekolah yang artinya terdapat sekitar 18% kepala rumahtangga yang tidak pandai membaca dan menulis huruf latin. Pendidikan kepala rumahtangga yang tertinggi adalah SMU yaitu sekitar 1% atau sebanyak 1 orang.

**Tabel 3. Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Frekuensi (orang)</b>	<b>Persen (%)</b>
Tidak Pernah Sekolah	18	18
SD/SR/Sederajat	76	76
SMP/Sederajat	5	5
SMU/Sederajat	1	1
Total	100	100

Sumber : Data Penelitian di Kabupaten Pasaman (Primer). 2015.

Rendahnya tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan kemiskinan. Hal ini terlihat dari hampir seluruh rumah tangga atau sekitar 90 % kepala rumah tangga adalah penerima program kemiskinan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tetapi tidak semua bantuan program kemiskinan dapat diterima oleh kepala rumah tangga, seperti yang menerima Askeskin hanya diterima oleh 41 % kepala rumah tangga, bantuan Raskin 89%. Sedangkan bantuan beasiswa untuk pendidikan anak mereka hanya diterima oleh 6% rumah tangga.

#### **Mata Pencarian Rumah Tangga.**

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa jenis lapangan usaha rumah tangga umumnya adalah dibidang perkebunan, dimana 73 % bermata pencarian di bidang perkebunan, 25% bekerja di bidang pertanian dan tanaman pangan dan sisanya 2% bekerja disektor lain.

**Tabel 4. Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Pekerjaan Utama**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah (Org)</b>	<b>Persen (%)</b>
Pertanian&Tanaman Pangan	25	25
Perkebunan	73	73
Lainnya	2	2
Total	75	100,0

Sumber : Data Penelitian di Kabupaten Pasaman (Primer). 2015.

Sekitar 51 % kepala rumah tangga bekerja sebagai buruh dan 46% berusaha sendiri dan 3% bekerja sebagai pekerja keluarga dengan jumlah hari kerja rata-rata sebanyak 6 hari kerja seminggu dan pendapatan rata-rata yang diterima kepala rumah tangga sebesar Rp 1.030.220,- per bulan.

**Tabel 5. Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga**

<b>Status Pekerjaan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Persen (%)</b>
Buruh	51	<b>51</b>
Berusaha Sendiri	46	<b>46</b>
Pekerja Keluarga	3	<b>3</b>
Total	100	<b>100</b>

Sumber : Data Penelitian di Kabupaten Pasaman (Primer). 2015.

### **Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata pendapatan rumahtangga per bulan dimulai dari Rp 320.000,- sampai Rp 3.000.000,-. Secara rata-rata pendapatan per bulan rumahtangga adalah sebesar Rp 1.030.220,-. Bila dihubungkan dengan rata-rata anggota rumah tangga yang ditanggung sebanyak 7 orang, maka rumahtangga tersebut termasuk kategori miskin dengan rata-rata pendapatan per orang sebesar Rp.147.200,- sedangkan karena garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah Rp182.636 (BPS, 2008).

Berdasarkan Tabel 4.10 terlihat bahwa lebih banyak rumahtangga memiliki pendapatan antara Rp 1.301.000,- - Rp 1.300.000,- yaitu sebanyak 46%. Rumahtangga yang berpendapatan rata-rata dibawah Rp800.000,- per bulan juga termasuk banyak, yaitu sebanyak 36%. Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat rendah sekali pendapatan rumahtangga miskin di Kabupaten Pasaman dimana mereka harus menanggung anggota keluarga rata-rata sebanyak 7 orang.

**Tabel 6. Rata-rata Pendapatan Kepala Rumah Tangga**

<b>Rata-Rata Pendapatan/Bulan (Rp)</b>	<b>Frekuensi (Orang)</b>	<b>Percent (%)</b>
300.000 - 800.000	36	36
801.000 - 1.300.000	46	46
1.301.000 - 1.800.000	1	1
1.801.000 – 2.300.000	16	16
2.301.000>	1	1
	100	100

Sumber : Data Penelitian di Kabupaten Pasaman (Primer). 2015.

### **Pengeluaran Rumahtangga Untuk Pendidikan**

**Tabel 7. Rata-rata Pengeluaran Pendidikan rumahtangga per Bulan**

<b>No</b>	<b>Pengeluaran untuk Pendidikan (Rp)</b>	<b>Frekuensi (Orang)</b>	<b>Percent (%)</b>
1	10.000,- - 20.000,-	27	27
2	21.000,- - 40.000,-	20	20
3	41.000,- - 60.000,-	28	28
4	61.000,- - 80.000,-	11	11
5	81.000,- - 100.000,-	11	11
6	101.000,- - 200.000,-	2	2
7	265.000,- >	1	1
Total		100	100

Sumber : Data Penelitian di Kabupaten Pasaman (Primer). 2015.

Pengeluaran rumahtangga untuk pendidikan tergantung pada berapa besarnya rata-rata pendapatan rumahtangga per bulan. Berdasarkan hasil



penelitian besarnya pengeluaran rumahtangga untuk pendidikan berkisar Rp 10.000,- sampai dengan Rp 265.000,- per bulan dengan rata-rata pengeluaran untuk pendidikan per bulan sebesar Rp 50.000,-. Suatu angka yang sangat sedikit sekali demi terjaminnya keberlangsungan pendidikan anak. Rendahnya pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dikarenakan pendapatan rata-rata rumah tangga yang memang rendah yang diiringi oleh besarnya jumlah tanggungan / beban rumah tangga sebesar 7 orang.

Berdasarkan rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1.033.220,- per bulan maka dapat disimpulkan bahwa rumahtangga hanya mampu menyisihkan sebesar 4,85% dari pendapatannya untuk membiayai pendidikan anaknya.

Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan peranan pemerintah dalam membantu rumahtangga untuk membiayai pendidikan anak mereka demi tercapainya penuntasan pendidikan dasar 9 tahun.

### **Bantuan Program Kemiskinan**

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa seluruh rumah tangga sampel adalah rumah tangga miskin.. Dengan pendapatan rata-rata per bulan sebesar Rp 1.030.220,- per bulan dan menghidupi rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 7 orang, maka rumah tangga semuanya berhak untuk mendapatkan bantuan kemiskinan. Hal ini terlihat dari bantuan program kemiskinan yang diterima oleh rumah tangga. Bantuan Langsung Tunai diterima oleh 90 % rumah tangga, Askeskin 41 %, bantuan Raskin 89% dan bantuan berupa beasiswa pendidikan untuk anak sebesar 6%.

### **Permasalahan Pendidikan Dasar Secara Internal**

Penelitian ini menggunakan sampel rumah tangga yang mempunyai anak putus sekolah berusia 10 – 15 tahun baik itu putus Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari 100 rumah tangga yang dijadikan sampel di Kecamatan Mapat Tunggul dan Duo Koto di Kabupaten Pasaman terdapat 49 % anggota rumah tangga yang putus SD dan 51 % putus SMP.

Dengan menggunakan Modul Pendidikan Benchmarking Data Kesehatan Dan Pendidikan Susenas Tahun 2003 maka permasalahan pendidikan dasar secara internal dapat diuraikan pada subbab berikut ini.

### **Kesulitan biaya sekolah**

Sekitar 53 % rumahtangga menyatakan bahwa alasan utama rumahtangga tidak menuntaskan pendidikan dasar anaknya adalah karena kesulitan biaya sekolah. Sedangkan sisanya sebesar 47 % menyatakan factor lain sebagai penyebab tidak tuntasnya pendidikan dasar anak mereka.

Kesulitan dalam mengeluarkan biaya pendidikan bagi rumahtangga terdapat dalam berbagai bentuk kesulitan. Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa kesulitan dalam mengeluarkan biaya pendidikan bagi rumahtangga adalah kesulitan dalam pembelian Seragam Sekolah, yaitu sebesar 68%, dan sebesar 50% kesulitan dalam pembelian buku dan Peralatan Sekolah. Yang menariknya sebesar 31% rumahtangga mengalami kesulitan dalam mengeluarkan biaya lain-

lain untuk anaknya yaitu uang jajan di sekolah, sedangkan kesulitan yang paling kecil adalah transportasi anak ke sekolah (23%).

**Tabel 8. Bentuk-bentuk Kesulitan Pembiayaan Pendidikan**

No	Bentuk Kesulitan	Frekuensi (Org)*	Persentase(%)
1.	Uang Buku/ Peralatan Sekolah	50	50
2.	Transportasi	23	23
3.	Pembelian Seragam Sekolah	68	68
4.	Lainya, Seperti Jajan	31	31
Total		172	100

Sumber : Data Penelitian di Kabupaten Pasaman (Primer). 2015.

\*Jawaban responden boleh lebih dari 1

Sekitar 68% rumahtangga menyatakan bahwa mereka kesulitan dalam mengeluarkan biaya untuk membeli seragam sekolah. Rumahtangga mengeluarkan biaya pendidikan untuk membeli seragam sekolah mulai dari Rp 50.000,- sampai dengan Rp 520.000,-. Sekitar 31% rumahtangga mengeluhkan karena harus membayar baju seragam sekolah termasuk baju olahraga seharga Rp 520.000,- untuk 4 stel pakaian. Sekitar 29% harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 180.000,- untuk membeli seragam sekolah, dan 27 % rumahtangga mengeluarkan biaya sebesar Rp 100.000,-. Hanya 9% rumahtangga yang mengeluarkan biaya pembelian seragam sekolah yang paling murah, yaitu Rp 50.000,-.

Pada Tabel 8 dapat dilihat berbagai bentuk kesulitan rumahtangga dalam membiayai pendidikan dasar anak mereka. Walaupun program pemerintah dalam bentuk dana BOS dan BOS Buku sudah tersedia, rumahtangga masih mengalami kesulitan dalam mengeluarkan biaya pendidikan untuk membeli seragam sekolah, membeli buku dan peralatan sekolah dan lainnya dan menganggap biaya pendidikan masih mahal. Meskipun sekitar 76% anggota rumah tangga sudah mendapatkan beasiswa yang diterima per 3 bulan dengan kisaran Rp 300.000,- sampai dengan Rp 400.000,- namun tetap tidak bisa membantu menuntaskan pendidikan dasar.

Sekitar 76 orang dari seratus sampel anggota rumahtangga atau 76% anggota rumahtangga dulunya adalah penerima bantuan beasiswa dari pemerintah dan 24% menanggung biaya sekolah sendiri. Bentuk bantuan tersebut adalah dalam bentuk uang yang jumlahnya sekitar Rp 300.000,- sampai dengan Rp 400.000,- dan beasiswa tersebut diterima per 3 bulan. Beasiswa yang diterima tersebut dimanfaatkan untuk biaya sekolah, untuk membantu orang tua dan untuk jajan.

Secara keseluruhan biaya sekolah masih ditanggung seluruhnya oleh rumahtangga. Biaya sekolah 99% masih ditanggung oleh rumah tangga. Dengan pendapatan rata-rata rumah tangga yang rendah yaitu Rp 1.030.220,- per bulan rumah tangga mengalami kesulitan untuk membiayai kelanjutan pendidikan anak. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa adanya dana BOS belum sepenuhnya mampu menjamin keberlangsungan pendidikan anak di tingkat dasar.

### **Tidak ada Motivasi Sekolah**

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa 40 % alasan tidak menuntaskan pendidikan dasar adalah karena tidak adanya motivasi untuk sekolah, baik dari orang tua maupun dari si anak sendiri. Suatu angka yang patut menjadi perhatian bagi Pemerintah daerah yang semula hanya mempertimbangkan factor ekonomi saja sebagai penyebab tidak tuntasnya pendidikan dasar, ternyata ada factor lain yang cukup besar mempengaruhi yaitu factor motivasi sekolah yang rendah. Motivasi orang tua di pengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan orangtua dimana sekitar 76% pendidikan kepala rumahtangga adalah tamat SD, bahkan 18% kepala rumahtangga tidak pernah sekolah.

### **Pikiran Tidak Mampu**

Alasan ketiga penyebab tidak tuntasnya pendidikan dasar adalah karena pikiran tidak mampu. Sekitar 32% kepala rumahtangga mengatakan bahwa tidak tuntasnya pendidikan dasar disebabkan karena pikiran anggota rumahtangga mereka tidak mampu lagi untuk melanjutkan pendidikan sehingga merupakan menjadi penyebab tidak tuntasnya pendidikan dasar.

### **Nilai Kurang / Jelek.**

Dari hasil penelitian terlihat bahwa sekitar 17 % rumah tangga menyatakan bahwa penyebab anak putus sekolah adalah karena nilainya jelek / kurang. Nilai sekolah juga mempengaruhi keberlanjutan pendidikan. Nilai yang baik membuat motivasi orang tua maupun anak tinggi untuk tetap sekolah. Namun sebaliknya nilai yang jelek berpengaruh negatif terhadap motivasi orang tua dan anak. Rendahnya nilai karena sebagian anak harus ikut bekerja membantu orangtua sehingga waktu untuk belajar berkurang.

### **Membantu mengurus rumah tangga.**

Dari 100 rumahtangga yang dijadikan sampel penelitian, 13 % mengungkapkan bahwa tidak tuntasnya pendidikan dasar anak mereka disebabkan karena anak harus membantu mengurus rumah tangga dimana rata-rata rumah tangga mempunyai anggota 7 orang. Banyaknya jumlah anggota rumah tangga mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Karena tekanan ekonomi menuntut keluarga untuk bekerja lebih keras agar bisa menghidupi keluarga.

Dengan pendapatan rata-rata Rp 1.030.220,- per bulan, rumah tangga berada dalam lingkaran kemiskinan. Sehingga hal ini berimbas terhadap keberlanjutan pendidikan anak, dimana anak - khususnya anak perempuan - terpaksa harus ikut membantu mengurus rumah tangga selagi orang tua bekerja di lading/kebun. Mereka harus menjaga adik-adik mereka yang masih kecil dan mengurus rumah tangga sementara orang tua bekerja di ladang / kebun. Begitupun dengan orang tua, yang sebenarnya ingin anak mereka tetap bersekolah, tetapi karena kondisi ekonomi ditambah dengan tanggungan keluarga yang besar membuat orang tua tidak punya pilihan selain mengharap anak

mereka (perempuan) untuk menjaga anak-anak mereka yang lain dan membantu mengurus rumah tangga.

### **Merasa Pendidikan Cukup**

Rendahnya pendidikan kepala rumahtangga berdampak terhadap kepuasan atas pendidikan anaknya. Kepala rumahtangga merasa pendidikan anak cukup setingkat lebih tinggi dari pendidikan kepala keluarga. Sekitar 11% kepala rumahtangga menyatakan bahwa mereka sudah merasa pendidikan yang cukup terhadap anak mereka apabila anak mereka sudah bisa membaca dan lebih tinggi tingkat pendidikannya dari mereka.

Sekitar 76% pendidikan kepala rumahtangga hanya tamat SD dan 18% tidak pernah sekolah sehingga berdampak terhadap keberlanjutan pendidikan anak. Adanya kepuasan dengan sudah lebih tingginya pendidikan anak dari pendidikan orangtua berpengaruh terhadap keberlanjutan pendidikan anak dan menjadi penyebab rumah tangga tidak menuntaskan pendidikan dasar anak mereka.

### **Bekerja sebagai Pekerja Keluarga dan Bukan Pekerja Keluarga**

Dari hasil penelitian di peroleh bahwa 44% anggota rumahtangga bekerja baik sebagai pekerja keluarga maupun bekerja dengan orang lain. Dan sekitar 3% alasan tidak tuntasnya pendidikan dasar adalah karena bekerja sebagai pekerja keluarga. Hal ini disebabkan karena kesulitan ekonomi sebagian orang tua dihadapkan pada pilihan antara menyekolahkan anak atau mempekerjakan anak sebagai pekerja keluarga di laadang/kebun mereka sendiri sehingga hal ini berdampak terhadap penuntasan pendidikan dasar anak dan menyebabkan anak tidak dapat menamatkan dan melanjutkan pendidikannya.

Sedangkan sekitar 1% anggota rumah tangga bekerja pada orang lain, bukan sebagai pekerja keluarga. Rendahnya kehidupan ekonomi rumahtangga berdampak terhadap penuntasan pendidikan dasar anak, karena kondisi tersebut menuntut mereka untuk membantu orangtua memenuhi kebutuhan keluarga.

Jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh anggota rumahtangga adalah sebagai Buruh karet, yaitu sekitar 12%, kemudian berkebun 8%, mendulang emas 8%, membantu orangtua 7%, sebagai pekerja atau pembantu rumahtangga 4%, sebagai buruh tani dan mencari burung di hutan masing-masing 2% dan 1 % mencari Batu Akik.

### **Sakit / Cacat**

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa 2% penyebab tidak tuntasnya pendidikan dasar adalah karena alasan sakit / cacat. Sakit / cacat merupakan studi kasus, dimana kejadiannya tidak bisa dihindarkan dan bukan kehendak orang tua ataupun anak untuk tidak melanjutkan pendidikan.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan internal bagi rumahtangga dalam menuntaskan pendidikan dasar anak adalah karena rumah tangga kesulitan membiayai pendidikan yang disebabkan rendahnya pendapatan keluarga. Pendidikan masih dianggap barang mahal sehingga tidak semua rumah tangga mampu membiayai pendidikan anak,

walaupun sudah ada dana BOS yang menggratiskan SPP anak per bulan. Hal ini sesuai dengan pendapat Lloyd and Blank, 1996 (dalam Elfindri, 2001) bahwa faktor ekonomis merupakan penyebab utama mereka tidak bisa menikmati sekolah disamping faktor non-ekonomis lainnya. Rumah tangga masih menanggung biaya pendidikan terbesar. Dan Program BOS tidak mampu menanggulangi ketidak berdayaan rumah tangga untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Budiwati & Toyamah (2006) dimana program BOS hanya mampu memenuhi sekitar 23 % dari kebutuhan biaya untuk menyelenggarakan pendidikan. Karena masih adanya biaya – biaya pendidikan lain yang harus ditanggung oleh rumah tangga miskin.

### **Permasalahan Pendidikan Dasar Secara Eksternal**

Permasalahan penuntasan pendidikan dasar bagi rumahtangga miskin secara eksternal dapat dilihat dari 2 hal yaitu dari jarak tempat tinggal ke sekolah dan pengaruh lingkungan.

#### **Pengaruh Lingkungan**

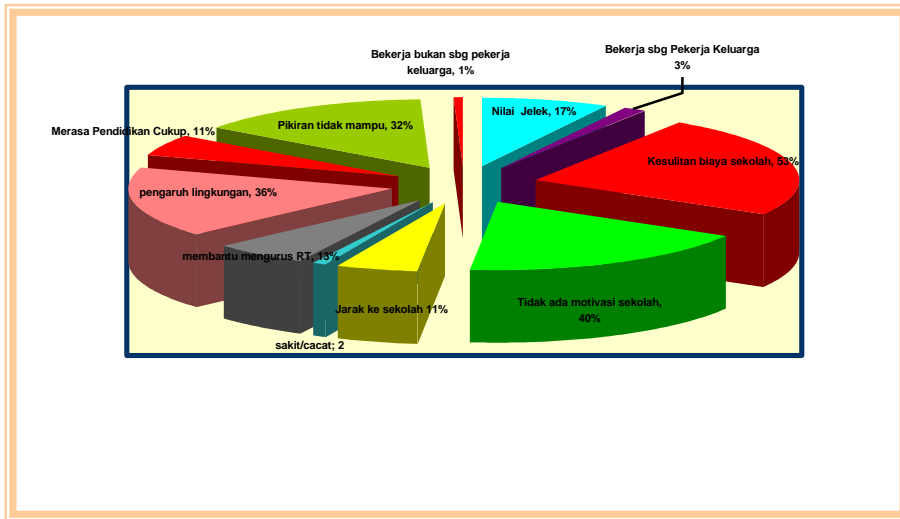
Faktor lingkungan cukup besar mempengaruhi penuntasan pendidikan dasar di Kabupaten Pasaman. Sekitar 36% penuntasan pendidikan dasar disebabkan karena pengaruh lingkungan, seperti pengaruh adanya anak yang tidak sekolah di lingkungan mereka. Secara keseluruhan di sekitar rumahtangga terdapat anak putus sekolah yang berefek terhadap keberlangsungan pendidikan anak disekitarnya. Adanya anak lain yang tidak sekolah di sekitar lingkungan tempat tinggal berpengaruh besar terhadap keberlangsungan pendidikan anak. Karena perilaku mereka yang bebas membuat anak yang dahulunya sekolah merasa terpengaruh dan bahkan membuat motivasi mereka ke sekolah menjadi berkurang dan akhirnya berhenti sekolah.

Pengaruh lingkungan ini harus menjadi perhatian juga bagi pemerintah daerah Kabupaten Pasaman, mengingat factor pengaruh lingkungan ini merupakan faktor ketiga terbesar yang mempengaruhi penuntasan pendidikan dasar disamping faktor ekonomi (kesulitan biaya pendidikan) dan faktor tidak adanya motivasi sekolah.

#### **Jarak tempat tinggal ke sekolah jauh.**

Pemukiman penduduk di daerah perkebunan dan daerah hutan cenderung berkelompok di wilayah tertentu, di mana terdapat sarana dan prasarana sekolah dan pasar. Untuk menuju sekolah rata-rata dibutuhkan waktu  $\pm$  38 menit dengan jarak tempuh rata-rata sejauh  $\pm$  1,7 Km. Jarak yang cukup jauh rumah ke sekolah 92% ditempuh dengan berjalan kaki. Cukup jauhnya jarak lingkungan tempat tinggal ke sekolah baik itu SD maupun ke SMP merupakan salah satu factor penyebab tidak tuntasnya pendidikan dasar. Bila diamati jarak dari rumah penduduk ke sekolah yang rata-rata cukup jauh yaitu 1,7 Km, mulai dari 0,5 Km sampai dengan 6 Km, ternyata lebih banyak dilakukan oleh anggota rumah tangga dengan berjalan kaki.

Bila dibuat pemetaan permasalahan internal dan eksternal bagi rumahtangga dalam menuntaskan pendidikan dasar di kabupaten Pasamaan dapat digambarkan pada grafik dibawah ini.



**Grafik1. Pemetaan Permasalahan Rumahtangga dalam menuntaskan pendidikan dasar secara internal dan eksternal di kabupaten Pasamaan (%)**

Sumber : Data Penelitian di Kabupaten Pasaman (Primer). 2015.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa permasalahan dan kendala utama yang dihadapi oleh rumah tangga miskin dalam menuntaskan pendidikan dasar baik secara internal maupun secara eksternal. Permasalahan utama rumah tangga dalam menuntaskan pendidikan dasar secara internal adalah sebagai berikut ;1) 53% karena kesulitan membiayai sekolah yang disebabkan karena pendapatan rumahtangga yang rendah yaitu sebesar Rp 1.030.220,- rata-rata perbulan, sedangkan jumlah anggota rumahtangga rata-rata adalah 7 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan masih menjadi faktor utama penyebab rumahtangga tidak bisa menuntaskan pendidikan dasar, apalagi rumahtangga hanya mampu menyisihkan sebesar 4,85% dari pendapatan rata-rata perbulan untuk membiayai pendidikan anak, 2) 40% karena tidak adanya motivasi sekolah baik itu dari anak maupun rumahtangga, 3). 32% karena pikiran tidak mampu, 4).17% karena Nilai kurang atau Jelek hal ini lebih banyak disebabkan karena kurangnya waktu bagi anak untuk belajar dikarenakan kondisi kemiskinan yang menyebabkan mereka harus bekerja membantu orangtua untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga, 5).13% karena membantu mengurus rumahtangga, hal ini dikarenakan jumlah anggota rumahtangga yang banyak yaitu rata-rata 7 orang menyebabkan rumahtangga tidak bisa menuntaskan pendidikan dasar anak terutama anak perempuan karena harus mengurus dan

mengatur rumahtangga sementara orangtua bekerja dikebun/ ladang, 6). 11% karena rumahtangga merasa pendidikan anak sudah cukup karena sudah lebih baik atau lebih tinggi dari pendidikan kepala rumahtangga, 7&8) 3% karena bekerja sebagai pekerja keluarga dan 1% sebagai buruh, 9) 2% karena sakit/cacat sehingga tidak bisa menuntaskan pendidikan dasar.

Sedangkan permasalahan rumahtangga dalam menuntaskan pendidikan dasar secara eksternal ada 2, yaitu 1) 36% karena pengaruh lingkungan, dimana di sekitar pemukiman rumahtangga umumnya banyak terdapat anak putus sekolah sehingga hal ini berpengaruh terhadap anak yang sekolah dan ikut-ikutan terpengaruh untuk tidak sekolah, 2) 11% karena jarak yang jauh ke sekolah menyebabkan rumahtangga tidak mampu untuk menuntaskan pendidikan dasar karena jarak yang jauh diiringi pula oleh ongkos transport yang besar.

Dari penelitian ini dapat diambil 'sehelai benang merah' yang sangat diperlukan dalam usaha penuntasan pendidikan dasar, terutama pada daerah-daerah yang beresiko terjadinya kegagalan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Pasaman, bahwa kebijakan dalam menuntaskan pendidikan dasar tidak bisa dilakukan secara general seperti karena faktor ekonomi saja, tetapi harus ada kebijakan lain yang bersifat bantuan moril, mengingat faktor motivasi yang rendah dan pengaruh lingkungan juga berpengaruh besar terhadap kegagalan dalam menuntaskan pendidikan dasar di Kabupaten Pasaman.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anas, Yulia, Elfindri. 2010. *Strategi Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun Pada Level Rumah Tangga di kabupaten Pasaman: Implikasi Terhadap Pencapaian MDGs*. Penelitian Hibah Potensi Pendidikan Kabupaten-Kota. Dikti Jakarta.
- A. Lamerz, J. Kuepper-Nybelen, C. Wehle. 2005. *Social class, Parental education and obesity prevalence in a study of six-year-old children in Germany*. International Journal of Obesity 29, 373-380
- BPS, Bappenas dan UNDP (2004) *Ekonomi dan Demokrasi: Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia*, Kerjasama BPS, Bappenas dan UNDP, Jakarta.
- BPS. 2014. Pasaman Dalam Angka.
- Bappeda Kabupaten Pasaman.RPJM Kabupaten Pasaman tahun 2010-2015. Pasaman. 2012.
- Becker, Gary S. 2002. *Investment in Human Capital : A Theoretical Analysis*. Columbia university and national Bureau of Economic research.
- Dinas Pendidikan Kab. Pasaman. 2012. *Profil Pendidikan*. Lubuk Sikaping. Kabupaten Pasaman.
- Depdiknas. 2003. UU No. 20 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Depdiknas, Dirjen Dikdasmen. Jakarta
- Elfindri (1998) *Study Kelangsungan Pendidikan Anak di Sumatra Barat, Ekonomi Keuangan Indonesia (EKI)*, Vol XLI, No. 2, hal 13-23.
- Fiske, E.D. (1996) *"Decentralization od Education: Politic and concensus"*, The World Bank, Washington DC.

- John Jerrim. 2009. *Children's education and parent's socio-economic status : distinguishing the impact of mothers and fathers*. Institute of Education, University of London.
- Luisa Escriche and Gonzalo Olcina. 2006. *Education and Family Income : Can Poor Children Signal Their Talent*. Universitat de Valencia. Dpto. Analisis Economico, Edificio Departamental Oriental, Campus dels Taronggers.
- Levine, D.U., dan Havighurst, R.J. 1992. *Society and Education*. Nodham Heights, Massachusetts: A Division of Simon & Schuster, Inc.
- Lebowitz, A (1996) "An Economic analysis of Educational Attainment", *Journal of Economic Literatures*, Vol. XXXI, pp. 204-226.
- Narayan, Deepa (1995) '*Designing community-Based Development*.' Paper 7. World Bank, Environment Department, Washington DC.
- Yahya Jammal & Wendy Hartanto. 2003. Modul Pendidikan. Benchmarking Data Kesehatan Dan Pendidikan Susenas. **Statistical Assistance to the Government of Indonesia (STAT) Project** USAID. Laporan Statistik.
- World Bank (1989) "Indonesia: Basic Education Study." East Asia and Pasific Regional Office, Country Department III, Washington DC.
- World Bank (2006) 'The willingness to Pay for Education: Evidence in Nicaragua' The *World Bank Reseach*